

RINGKASAN

Dianti Novita Marwa 24741010101051 **DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

(Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H. dan Dr. Mukhlis, S.H., M.H.)

Dissenting opinion dalam praktik Mahkamah Konstitusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika peradilan konstitusi di Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya mencerminkan bahwa proses penafsiran konstitusi tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka terhadap berbagai perspektif yang lahir dari independensi dan integritas hakim konstitusi. Sekalipun secara yuridis *dissenting opinion* tidak memiliki kekuatan mengikat seperti *majority opinion*, tetapi secara substantif memiliki peran penting dalam memperkaya diskursus hukum tata negara.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa *dissenting opinion* hakim dalam pengambilan keputusan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi dan implikasi *dissenting opinion* tersebut dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif* melalui studi kepustakaan dan *content analysis* melalui sumber primer, skunder dan tersier berupa undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, doktrin dan sumber pendukung lainnya.

Penelitian *dissenting opinion* hakim melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan, namun memuat argumentasi konstitusional yang kuat terkait batas kewenangan lembaga, pentingnya prinsip *checks and balances*, serta perlindungan terhadap partisipasi publik dan keadilan prosedural. Implikasi *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan hukum tata negara Indonesia sebagai kritik konstitusional, pembaharuan hukum dan pendidikan hukum bagi masyarakat serta doktrin.

Kata kunci: *dissenting opinion*, hakim, mahkamah konstitusi, hukum tata negara